



**DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI
PASAR BULU KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Program Studi Ilmu Politik S1

Oleh:

Windhy Prasetyo

NIM. 3312414066

UNNES

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia

Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi 1



Dr. Eko Handoyo, M.Si.

NIP. 196406081988031001

Pembimbing Skripsi 2



Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom.

NIP. 198502072014042001

Mengetahui:

Ketua Jurusan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 September 2019

Penguji I



Moh. Aris Munandar, S.Sos., MM.

NIP. 197207242000031001

Penguji II



Dr. EkoHandoyo, M.Si.

NIP. 196406081988031001

Penguji III



Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom.

NIP. 198502072014042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.

NIP. 196308021988031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lainnya yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

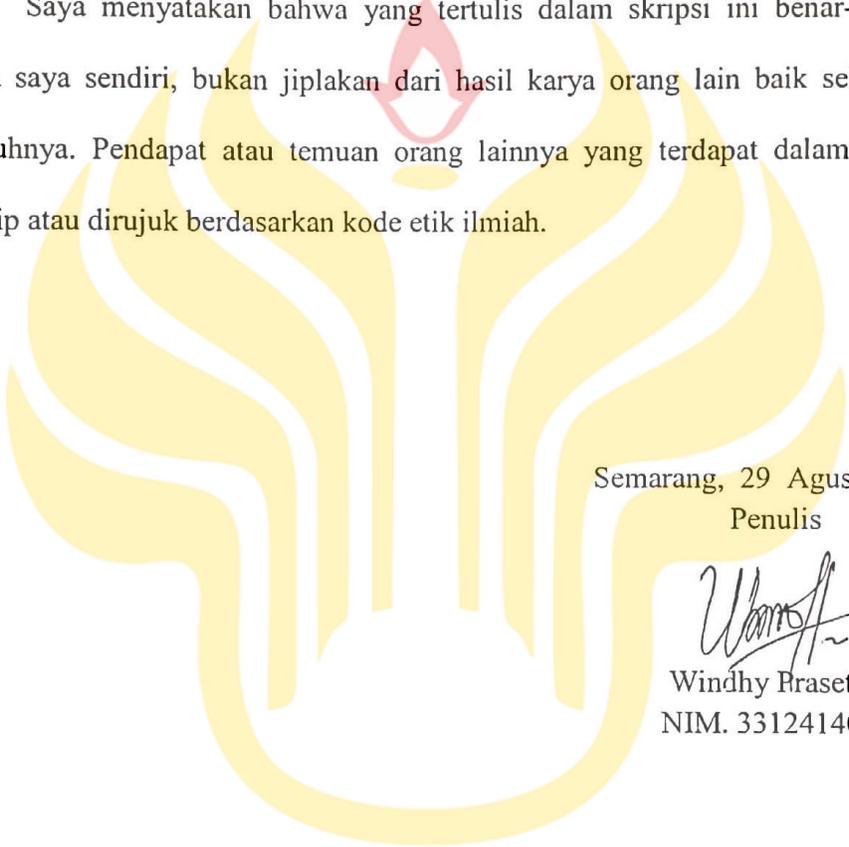
Semarang, 29 Agustus 2019

Penulis



Windhy Prasetyo

NIM. 3312414066



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha” (Bj. Habibie).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik dan menyayangi saya hingga sekarang, yang tidak hentinya selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang dan doa.
2. Kakak saya Anik Wahyuningsih dan Lina Puji Astuti yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
3. Dosen Pembimbing yang mengajari saya Dr. Eko Handoyo, M.Si dan Nugraheni Arumsari, S.Sos, M.I.Kom.
4. Sahabat-sahabat rangka, okta, lusi dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi.

5. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik

2014 yang menjadi penyemangat.

6. Almamater UNNES.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Prasetyo, Windhy. 2019. *Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang*. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Dr. Eko Handoyo, M.Si dan Dosen Pembimbing II Nugraheni Arumsari, S.Sos., M.I.Kom. 109 Halaman.

Kata Kunci : Kebijakan, Pasar, Revitalisasi.

Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu bertujuan untuk melakukan penataan terhadap pedagang dan pengembangan pasar tradisional menjadi pasar berkonsep semi modern. Revitalisasi Pasar Bulu diharapkan meningkatkan daya saing Pasar Bulu terhadap pasar modern yang ada di kota Semarang, juga untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Rumusan penelitian ini adalah : (1) bagaimana respons pedagang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang (2) bagaimana dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pedagang Pasar Bulu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi teknik reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) respons pedagang Pasar Bulu mayoritas informan memberikan respons negatif terhadap revitalisasi Pasar Bulu. Revitalisasi berdampak terhadap kegiatan perdagangan di Pasar Bulu yang merugikan pedagang dan revitalisasi tidak memberikan kesejahteraan bagi pedagang. (2) revitalisasi tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi pedagang, terbukti dari jumlah pengunjung mengalami penurunan dibandingkan dengan Pasar Bulu sebelum revitalisasi.

Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: Pemerintah Kota Semarang perlu meninjau kembali kondisi fisik bangunan pasar terutama pada lantai dua dan lantai tiga Pasar Bulu dan mengupayakan peran pemerintah dengan memberi bantuan sarana berdagang, pinjaman modal maupun pembinaan dari Pemerintah.

ABSTRACT

Prasetyo, Windhy. 2019. *The Impact of the Revitalization Policy Bulu Market Semarang City*. Final Research. Faculty of Political Science. Politics and Civics Department. Semarang State University. Mentor I Dr. Eko Handoyo, M. Sidan Dosen Mentor II Nugraheni Arumsari, S. Sos., M. I. Kom. 109 Pages.

Keywords: Policy, Market, Revitalization

The revitalization policy in Bulu Market Semarang aims to organize traders and develop traditional markets into a semi-modern concept market. Revitalizing the Bulu Market is expected to increase the competitiveness of the Bulu Market against the modern markets in Semarang, as well as to improve the welfare of traders. The formulation of this research are: (1) How are traders responses to the revitalization policy of Bulu Market Semarang City (2) How the policy impacts to the welfare of Bulu Market traders.

Research method that is used by the researcher is qualitative research. Kinds of data which is used are primary data and secondary data. Technique of collecting data uses interview technique, observe and documentation. This research uses qualitative analysis such as reduction technique, data presentment and data conclusion.

The results showed that: (1) the response of the majority informant of the Bulu Market traders gave a negative response to the revitalization of the Bulu Market. Revitalization has an impact on trading activities in the Bulu Market that harm traders and revitalization does not provide welfare for traders. (2) revitalization does not have an impact on welfare for traders, as evidenced by the number of visitors has decreased compared to the Bulu Market before revitalization.

Suggestions put forward by the researcher are as follows: The Semarang City Government needs to review the physical condition of the market buildings on the second and third floors of Bulu Market and strive for the role of the government by providing assistance in the form of trading facilities, capital loans and government assistance.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Moh. Solehatul Musthofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Eko Handoyo, M.Si dan Nugraheni Arumsari S.Sos., M.I.Kom. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan dan seluruh staf serta karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

6. Bapak Prayitno, ST, MT, narasumber dari Dinas Perdagangan Kota Semarang yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada penyusun dalam penelitian ini.
7. Bapak Pujiono, narasumber dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Bulu Kota Semarang yang telah membantu memberikan data dan informasi kepada penyusun dalam penelitian ini.
8. Ibu Mul, Ibu Rianti, Bapak Dodo, Ibu Mur, Ibu Hj. Sumirah, Ibu Wati, narasumber dari pedagang Pasar Bulu Kota Semarang yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua tercinta, yang telah memotivasi dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kakak saya Anik Wahyuningsih dan Lina Puji Astuti yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
11. Sahabat-sahabat dan teman-teman Program studi Ilmu Politik angkatan 2014, yang selalu memberikan motivasi selama mengerjakan skripsi.

Semarang, 29 Agustus 2019

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penyusun

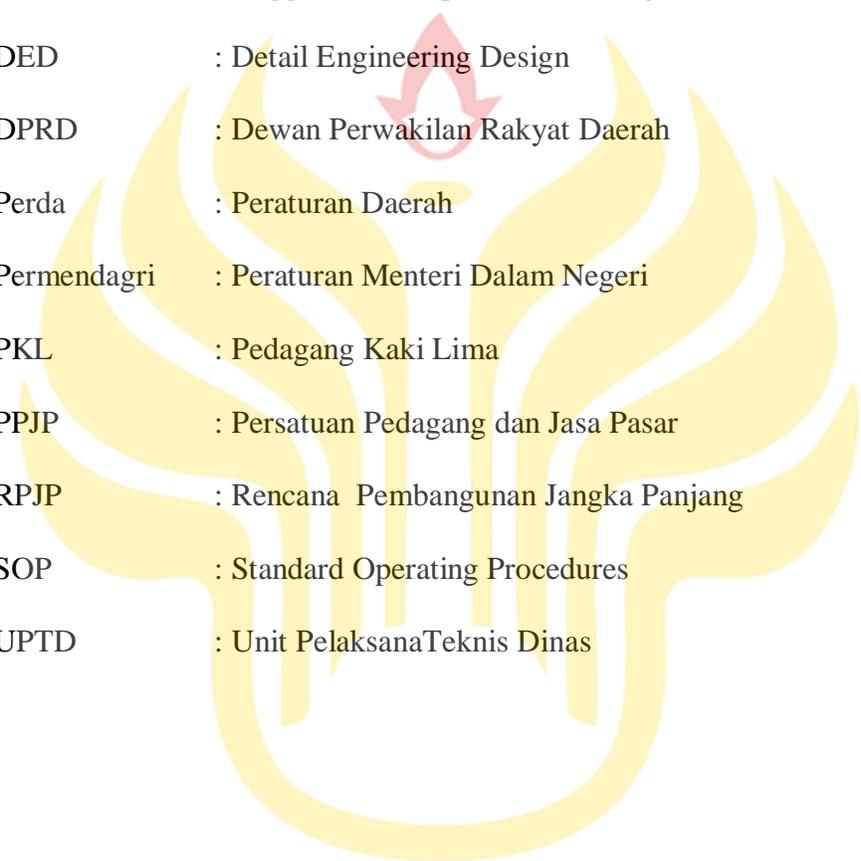
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vii
ABSTRACT	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Batasan Istilah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Deskripsi Teoritis	11

1. Konsep Kebijakan	11
a. Pengertian Kebijakan dan Implementasi Kebijakan	11
b. Ciri – Ciri Kebijakan	12
c. Tahap Penyusunan Kebijakan	13
d. Implementasi Kebijakan	15
2. Revitalisasi	21
a. Pengertian Revitalisasi	21
b. Tahapan Revitalisasi	24
3. Pasar	26
a. Pengertian Pasar	26
b. Fungsi Pasar	26
c. Pasar Tradisional	28
d. Ciri – Ciri Pasar Tradisional	29
4. Respons	30
a. Pengertian Respons	30
b. Faktor Terbentuknya Respons	31
c. Macam – Macam respons	32
B. Penelitian Yang Relevan	33
C. Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Latar Penelitian	45
B. Fokus Penelitian	45

C. Sumber Data	46
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	48
E. Uji Validitas Data	52
F. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Pasar Bulu Kota Semarang	55
1. Deskripsi Pasar Bulu Kota Semarang	55
2. Struktur Organisasi Pasar Bulu	59
3. Pokok Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang	60
B. Hasil Penelitian	64
1. Respons Pedagang Terkait Revitalisasi Pasar Bulu	64
2. Dampak Kebijakan Revitalisasi Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Bulu	73
C. Pembahasan	79
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR SINGKATAN



APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APDD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DED	: Detail Engineering Design
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PPJP	: Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
SOP	: Standard Operating Procedures
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Pengumpulan Data.....	51
-------------------------------	----



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

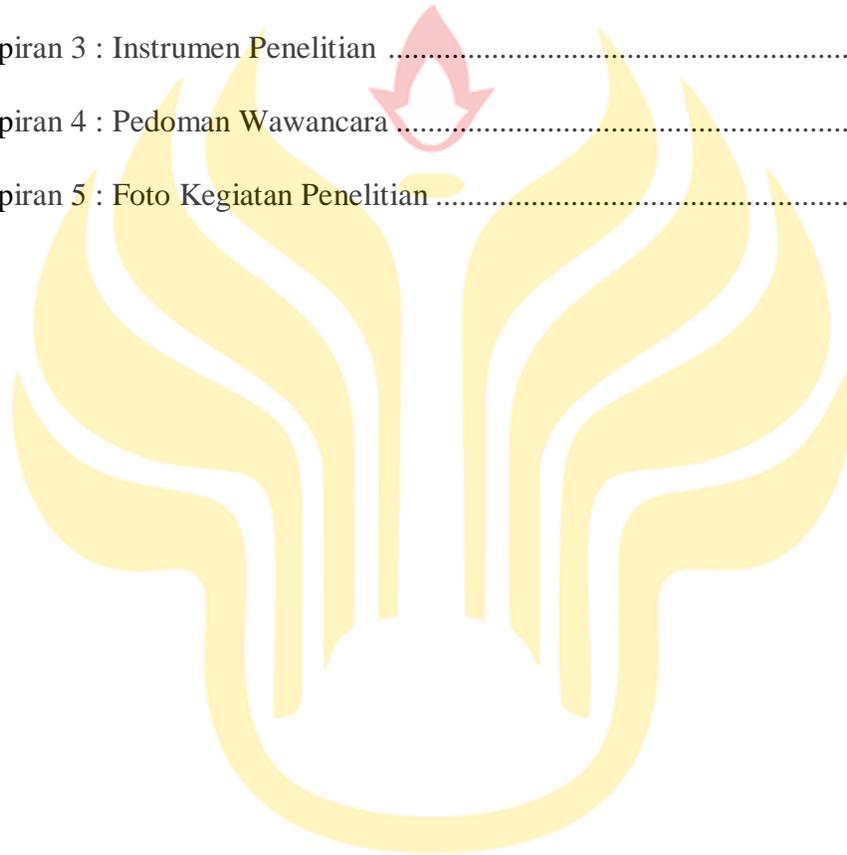
Bagan 1. Kerangka Berpikir	44
Bagan 2. Susunan Organisasi Inspektorat Kota Semarang	59



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	92
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian	93
Lampiran 3 : Instrumen Penelitian	98
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	104
Lampiran 5 : Foto Kegiatan Penelitian	106



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Seiring dengan semakin meningkatnya kesejahteraan seseorang, maka kebutuhan, harapan dan keinginannya pun meningkat.

Indonesia sebagai negara berkembang, dalam upaya mewujudkan kemakmuran serta mensejahterakan rakyat memberikan perhatian pada pembangunan di sektor ekonomi. Sektor ekonomi merupakan penunjang kemajuan suatu bangsa. Pemerintah harus mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilaksanakan di pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah karena dengan menguatnya perekonomian daerah akan menguatkan perekonomian nasional (Fitri, dkk, 2018).

Terdapat berbagai langkah yang menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, selain itu juga dapat dicapai dengan memberikan kesempatan untuk membuka berbagai jenis usaha terutama usaha kecil (Irnawati, 2014). Salah satu sarana perdagangan yang sampai saat ini tetap berjalan dengan lancar adalah pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar. Bangunan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang-barang elektronik, dan jasa, serta menjual kue-kue (Malano, 2011:1). Dalam sistem perekonomian, pasar memiliki peranan penting dalam memfasilitasi perdagangan dan pendistribusian produk hasil industri agar dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 Pasal 1 Ayat (3) Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,

modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Menurut Blokosuto (dalam Susilo dkk) terdapat 4 fungsi ekonomi yang dapat diperankan oleh pasar tradisional, yaitu:

1. Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat dari berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau, karena memang seringkali relatif lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain bahwa pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil.
2. Pasar tradisional merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas, terutama yang bermodal kecil.
3. Pasar tradisional merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang.
4. Akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala lokal, regional maupun nasional.

Selain fungsi ekonomi di atas, pasar tradisional juga mempunyai fungsi sosial, yaitu:

1. Pasar tradisional merupakan ruang untuk saling bertemu muka.

2. Pasar tradisional adalah tempat bagi masyarakat, terutama dari kalangan bawah, untuk melakukan interaksi social dan tukar informasi atas segenap permasalahan yang mereka hadapi.

Pasar tradisional merupakan salah satu pendorong perekonomian pada masyarakat kalangan menengah ke bawah dan akan memberikan efek yang bagus bagi negara. Dimana negara memang hidup dari perekonomian berskala mikro dibandingkan dengan skala makro (Farissa, 2017). Saat ini pasar tradisional merupakan tempat penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan dari pedagang berskala menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar produknya merupakan hasil pertanian. Pasar tradisional berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama bagi petani sebagai produsen untuk memperoleh pendapatan dari hasil pertaniannya. Pasar tradisional dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan para produsen, pedagang, pemasok, dan pembeli termasuk bahkan bagi tukang parkir sekalipun. Bagi pemerintah sebagai pengelola juga mendapat retribusi untuk kepentingan daerah dan juga disalurkan kembali untuk kepentingan masyarakat luas (Fitri dkk,2018).

Dibalik besarnya manfaat pasar tradisional, tidak terlewat berbagai permasalahan yang membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Keberadaan pasar tradisional mulai tergenser dengan keberadaan pasar modern yang jumlahnya semakin bertambah pesat yang mempunyai pengelolaan yang baik dan profesional membuat pasar tradisional mulai ditinggalkan masyarakat karena

alasan berbagai kelemahan dari pasar tradisional. Sebagian besar pasar tradisional masih terkesan becek, bau, sumpek, pengap dan kotor. Hal tersebut dibuktikan dari berbagai hasil penelitian khususnya di kota-kota besar di Indonesia yang menunjukkan bahwa keberadaan pasar modern telah berdampak pada penurunan omset pedagang di Pasar Tradisional secara signifikan (Yaningwati dkk, 2009).

Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu kota terbesar dan memiliki potensi yang tinggi dalam sektor perdagangan. Semarang adalah kota metropolitan terbesar ke lima di Indonesia (wikipedia). Letaknya yang sangat strategis, yaitu dilalui oleh perlintasan jalur Pantura, kondisi geografis yang berada di pesisir laut Jawa dan memiliki pelabuhan Tanjung Mas yang dapat menunjang aktifitas perdagangan besar ke seluruh Indonesia (Fitri dkk, 2018)

Pemerintah Kota Semarang dalam rangka mengangkat kembali eksistensi pasar tradisional di Kota Semarang melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan langkah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penataan dan pengembangan pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dalam Pasal 34 Ayat (3) disebutkan bahwa revitalisasi pasar ditujukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali kegiatan perdagangan yang terdapat di pasar. Program revitalisasi Pasar tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) tahun 2005-2025 dengan visi “Terwujudnya

Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Salah satu pasar tradisional di Kota Semarang yang telah direvitalisasi oleh Pemerintah yaitu Pasar Bulu. Pasar Bulu dilakukan revitalisasi bertujuan untuk melakukan penataan terhadap pedagang dan pengembangan pasar tradisional menjadi pasar berkonsep semi modern. Dengan dilakukan revitalisasi Pasar Bulu mampu menampung para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitar pasar. Revitalisasi Pasar Bulu menjadi pasar semi modern, bertujuan meningkatkan daya saing Pasar Bulu terhadap pasar modern yang ada di kota Semarang.

Penelitian ini didukung oleh penelitian oleh Dormatio (2018) yang berjudul Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Bermodal Kecil (Studi Kasus di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat) dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak pada orang-orang terlibat sebanyak 30 responden dalam kategori meningkat, 67 responden dalam kategori sama saja dan 2 dalam kategori menurun. Dampak kebijakan pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang sebanyak 19 responden masuk kategori meningkat, 7 responden masuk kategori menurun dan 73 responden masuk kategori sama saja. Dampak kebijakan biaya tak langsung sebanyak 21 responden masuk dalam kategori sama saja, 58 responden masuk kategori meningkat dan 20 responden masuk kategori menurun. Penelitian yang dilaksanakan memiliki perbedaan yakni

objeknya, penelitian diatas fokus pada pedagang kecil saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan kepada semua kategori pedagang.

Selanjutnya, penelitian oleh Rohmatun Nikmah (2015) yang berjudul Dampak Reitalisasi Pasar Tradisional Asembagus Terhadap Pendapatan dan Kepuasan Konsumen di Pasar Asembagus Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar Asembagus Situbondo dengan arah positif, semakin besar modal semakin besar pendapatan pedagang. Jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan, semakin lama jam kerja maka pendapatan meningkat. Jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pedagang. Hasil distribusi frekuensi kepuasan pembeli bernilai sangat tinggi, jadi masyarakat merasa puas dengan adanya revitalisasi pasar Asembagus. Penelitian yang dilaksanakan memiliki perbedaan yakni objeknya, penelitian diatas fokus pada kepuasan konsumen setelah revitalisasi saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan kepada respon pedagang terhadap revitalisasi.

Penelitian ini layak dilaksanakan karena dari dua penelitian diatas revitalisasi pasar banyak dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR BULU KOTA SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana respon pedagang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang?
2. Bagaimana dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pedagang Pasar Bulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui respon pedagang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap kesejahteraan pedagang Pasar Bulu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dampak kebijakan revitalisasi pasar tradisional terhadap kesejahteraan pedagang dengan perspektif teori implementasi kebijakan publik Edward III.

2. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan deskripsi dan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai implementasi program revitalisasi pasar tradisional beserta dampak dari revitalisasi tersebut dan diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah mengenai keberhasilan program revitalisasi pasar tradisional.

E. Batasan istilah

Dalam penelitian perlu dijelaskan beberapa istilah berkaitan dengan judul penelitian guna menghindari kesalahan penafsiran dalam judul penelitian.

1. Kebijakan

Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan, kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan, kebijakan memiliki *outcomes* di masa depan. Kebijakan menunjuk pada serangkaian tindakan muncul dari proses yang melibatkan hubungan organisasi serta melibatkan peran dari para agen kebijakan (Handoyo, 2012:4).

2. Revitalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) revitalisasi adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Kata “vital” mempunyai arti sangat penting atau sangat dibutuhkan, dan mendesak. Upaya revitalisasi pasar tradisional tidak hanya menjadi

tanggung jawab pemerintah, pembenahan ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalamnya.

3. Pasar

Pasar dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Sedangkan Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Konsep Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

Kebijakan menurut Anderson adalah suatu tindakan yang bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan di dalam mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan (Hosio, 2006:3). Dye memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Sementara itu, Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik (Hosio, 2006:3).

Menurut Geer dan Paul Hogget (Handoyo, 2013:5) berpendapat bahwa kebijakan memiliki arti umum dan spesifik. Arti umum tentang kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi dan kontinuitas, sedangkan arti spesifik tentang kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*) dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah termasuk di dalamnya ada tata kelola negara (*governance*) yang mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya (Handoyo, 2013:7).

Kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk :

- 1) Mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan;
- 2) Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya: masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk;
- 3) Memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor;
- 4) Melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan.

b. Ciri – Ciri Kebijakan

Ciri - ciri umum kebijakan adalah :

- 1) Orientasi pada tujuan dari suatu kebijakan sangat berarti jika dilihat dalam praktik politik dan kehidupan birokrasi di banyak negara.

- 2) Dalam bidang yang sama, suatu kebijakan berhubungan dengan kebijakan terdahulu dan akan diikuti oleh kebijakan lain dan seterusnya.
- 3) Kebijakan pada dasarnya adalah pedoman untuk bertindak, baik untuk melakukan maupun untuk tidak melakukan sesuatu guna mencapai tujuan, sehingga diperlukan adanya keputusan pengaturan dari pemerintah.
- 4) Selain melarang dan menganjurkan dalam masyarakat juga terdapat kebijakan yang tidak bersifat melarang dan juga tidak bersifat melarang.
- 5) Didukung oleh suatu kekuasaan yang dapat memaksa masyarakat atau pihak terkait untuk megindahkan sebagai pedoman (Abidin, 2012: 25).

c. Tahap Penyusunan Kebijakan

Menurut William N. Dunn (Winarno, 2007: 32) terdapat tahapan-tahapan penyusunan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Akhirnya, beberapa masalah masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau adapula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternative/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengemukakan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi mendapat dukungan para pelaksana (*Implementators*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

d. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana para aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan dan program. Implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Implementasi juga diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan tujuan (Winarno, 2008:144).

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2008:174) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Dalam mengkaji implementasi kebijakan digunakan 4 faktor, antara lain:

1) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan (Handoyo, 2013:112).

Terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi, yaitu sebelum pejabat mengimplementasikan keputusan, harus menyadari bahwa keputusan yang dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah yang disampaikan pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Kejelasan, yaitu jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidajelasan pesan komunikasi berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan atau

mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Sumber daya menurut Edward (dalam Winarno, 2008:181) meliputi; staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik dalam melaksanakan tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Staf, merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Jumlah staf banyak tidak secara otomatis berdampak positif dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh pegawai pemerintah. Namun, kekurangan staf akan menimbulkan persoalan pelik implementasi kebijakan. Informasi, yaitu para pelaksana harus dijelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Informasi mengenai program terutama mengenai kebijakan baru atau kebijakan yang melibatkan persoalan-persoalan teknis. Kurangnya pengetahuan pelaksana tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan akan memperoleh konsekuensi secara langsung. Wewenang, dalam satu program ke program lain wewenang akan berbeda-beda serta mempunyai banyak bentuk yang berbeda. Bila wewenang formal tidak ada, seringkali disalahmengerti oleh para pengamat dengan wewenang yang efektif. Fasilitas, seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan

koordinasi, tanpa perlengkapan, pembekalan maka implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

3) Komitmen (*disposition*)

Disposisi berkenaan dengan ketersediaan dan komitmen dari para implementator (pelaksana) untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Menurut Edwards (dalam Winarno, 2008:194), banyak kebijakan masuk ke dalam "zona ketidakacuhan". Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana. Jika pelaksana melaksanakan dengan baik maka kebijakan akan berjalan sesuai yang diinginkan, tetapi bila bersikap sebaliknya, pelaksanaan kebijakan akan sulit.

4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards (dalam Winarno, 2008:203) ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk

keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua, berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi-organisasi birokrasi- birokrasi pemerintah.

a. Standar Operating Procedure (SOP)

Dengan menggunakan Standar Operating Prosedure para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

b. Fragmentasi

Merupakan pembagian tanggungjawab suatu bidang kebijakan yang tersebar diantara beberapa organisasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi para birokrat karena alasan-alasan prioritas dari badan-badan yang berbeda mendorong birokrat untuk menghindari koordinasi dengan badan-badan lain. Padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.

2. Revitalisasi

a. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti proses, cara dan pembuatan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Kata “vital” mempunyai arti sangat penting atau sangat dibutuhkan, dan mendesak (dalam kehidupan dan sebagainya). Secara umum revitalisasi berarti usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi penting dan perlu kembali.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 pasal 1 ayat (1) tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi bertujuan untuk mengembalikan vitalitas ataupun daya hidup sebuah bangunan atau kawasan. Umumnya revitalisasi dapat dikaitkan dengan proses peremajaan bangunan, dimana intervensi yang dilakukan dapat mencakup aspek fisik dan non-fisik (ekonomi, sosial budaya dan sebagainya). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan bahwasanya vitalitas kawasan merupakan kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung produktivitas sosial, budaya dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya.

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) (Danisworo, 2002).

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Pasal 1 Ayat (10) disebutkan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan. Upaya revitalisasi pasar tradisional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, pembenahan ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan/ atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen

pengelolaan yang profesional; fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.

Maksud dan tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat adalah:

- 1) Mendorong agar pasar rakyat lebih modern dan mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, sehingga dapat meningkatkan omset pedagang pasar rakyat.
- 2) Meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik kepada masyarakat konsumen, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah.
- 3) Mewujudkan Pasar rakyat yang bermanajemen modern, lebih bersih, sehat, aman, segar, dan nyaman, sehingga dapat menjadi tujuan tetap belanja konsumen serta referensi dalam pembangunan pasar-pasar lainnya. Konsep dan Prinsip Revitalisasi Pasar Rakyat Program revitalisasi pasar rakyat Kemendag RI bukan hanya menyentuh perbaikan dari sisi perbaikan fisik saja, melainkan juga dari sisi ekonomi, sosial budaya dan manajemen.

Manfaat Revitalisasi menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (2013) adalah:

- 1) Peningkatan kualitas ruang kota/kawasan;
- 2) Mekuatnya identitas kota/kawasan;
- 3) Terselamatkannya aset pusaka kota;
- 4) Meningkatnya vitalitas/produktivitas ekonomi perkotaan.

b. Tahapan Revitalisasi

Revitalisasi bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik, tapi juga dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan revitalisasi diperlukan adanya keterlibatan masyarakat. Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Intervensi Fisik

Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal intervensi fisik. Intervensi fisik ini perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, system tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (*urban realm*). Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

2) Rehabilitasi Ekonomi

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan fisik, harus mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi dan sosial (*vitalitas baru*). Pemerintah juga harus mengakomodasi kegiatan ekonomi formal (*local economic development*). Sehingga rehabilitasi ekonomi mampu memberikan atau berdampak pada pemberian nilai tambah dan mendukung kegiatan ekonomi yang ada.

3) Revitalisasi Sosial/Institusional

Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*Intersting*), jadi bukan sekedar membuat *beatiful place*. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga (*public realms*). Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang baik (Danisworo,2002).

Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang.

3. Pasar

a. Pengertian Pasar

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Dari definisi ini, ada empat poin penting yang menonjol yang menandai terbentuknya pasar, yaitu:

- 1) Ada penjual dan pembeli.
- 2) Mereka bertemu di sebuah tempat tertentu.
- 3) Terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli, sehingga terjadi jual beli atau tukar menukar.
- 4) Antara penjual dan pembeli kedudukannya sederajat.

b. Fungsi Pasar

Fungsi pasar yang dijelaskan oleh USDRP dalam Pedoman Umum Pengelolaan Pasar, terdapat empat fungsi pasar, yaitu:

- 1) Fungsi Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Pasar jika dikaji secara jernih memiliki beberapa fungsi yang pasar modern tidak dapat menggantikannya. Setidaknya ada lima fungsi ekonomi yang sejauh ini bisa diperankan oleh pasar tradisional, yaitu:

- 1) Pasar tradisional memfasilitasi masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya sehari-hari dengan harga relatif terjangkau. Karena memang harga di pasar tradisional seringkali lebih murah daripada pasar modern.
 - 2) Pasar merupakan tempat yang relatif bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah. Pasar tradisional lebih mudah diakses sebagian besar pedagang, terutama yang bermodal kecil.
 - 3) Pasar merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan dan pengoperasian pasar setiap harinya.
 - 4) Pasar merupakan sarana distribusi perekonomian yang dapat menciptakan tambahan tempat usaha bidang jasa dan salah satu sarana pencipta kesempatan kerja.
 - 5) Akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam penghitungan tingkat ekonomi baik skala lokal, regional maupun nasional.
- 2) Fungsi Sosial Kemasyarakatan
- Terdapat beberapa fungsi kemasyarakatan dari keberadaan pasar tradisional, beberapa diantaranya adalah :
- a. Pasar merupakan ruang penampakan wajah asli masyarakat yang saling tergantung karena saling membutuhkan. Tawa, canda dan nilai-nilai kultural yang ada di masyarakat dapat dipotret dalam keseharian pasar.

Pasar adalah tempat bagi masyarakat terutama dari kalangan bawah, untuk melakukan interaksi sosial dan melakukan diskusi informal atas segenap permasalahan yang mereka hadapi.

2) Fungsi Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan tujuan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Untuk mewujudkan tujuan ekonomi pemerintah wajib melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana umum.

Pasar merupakan salah satu sarana publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Pasar merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh barang-barang untuk memenuhi kebutuhan harian. Pasar juga memiliki fungsi penggerak ekonomi daerah, tempat terjadinya distribusi hasil produksi masyarakat daerah.

c. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merupakan tempat dimana bertemunya antara para penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya proses jual beli secara langsung. Dalam Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los

dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Lebih lanjut menurut Perpres tersebut, pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar (Malano,2011). Bangunan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang disediakan oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar tradisional sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan seperti ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu adapula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya, dimana terdapat proses tawar-menawar sampai menemukan titik dimana persetujuan antara penjual dan pembeli.

d. Ciri-ciri Pasar Tradisional

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional terdapat ciri-ciri pasar tradisional antara lain:

- 1) Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;

- 2) Transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara tawar menawar;
- 3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Pasar tradisional terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenisnya seperti sayur, daging, dan lain-lain; dan
- 4) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal. Barang yang ditawarkan merupakan hasil bumi yang didapat dari daerah tersebut, meskipun terdapat beberapa komoditas yang didapat dari luar daerah tetapi tidak mengimpor.

4. Respons

a. Pengertian Respons

Menurut Jalaludin Rahmat, respons adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respons. Secara umum respons atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan (Rahmat, 1999: 51).

Ahmad Subandi mengemukakan respons dengan istilah balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi (Subandi, 1982:50). Adanya respons yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator akan menetralsir kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi.

b. Faktor Terbentuknya Respons

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. Dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri.

Dengan kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor (Walgito, 1999: 55) yaitu :

1) Faktor Internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

2) Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor stimulus. Faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.

c. **Macam-macam Respons**

Istilah respons dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respons dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut Chaferespon (dalam Rahmat, 1999: 118) dibedakan menjadi tiga bagian:

- 1) Kognitif : yang dimaksud dengan respons kognitif adalah respons yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respons ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
- 2) Afektif : yang dimaksud dengan respon afektif adalah respons yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
- 3) Konatif (Psikomotorik) : yang dimaksud dengan psikomotorik adalah respons yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan.

Menurut Agus Sujanto (2004: 31), ada bermacam-macam tanggapan yaitu:

- 1) Tanggapan menurut indera yang mengamati yaitu :
 - a. Tanggapan auditif, yakni tanggapan terhadap apa-apa yang telah didengarnya, baik berupa suara, kekuatan dan lain-lain.
 - b. Tanggapan visual, tanggapan terhadap sesuatu yang dilihat.
 - c. Tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya.
- 2) Tanggapan menurut terjadinya, yaitu :
 - a. Tanggapan ingatan, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang diingatnya.
 - b. Tanggapan fantasi, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dibayangkan.
 - c. Tanggapan pikiran, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkannya.
- 3) Tanggapan menurut lingkungannya yaitu :
 - a. Tanggapan benda, yaitu tanggapan terhadap benda yang menghampirinya atau berada didekatnya.
 - b. Tanggapan kata-kata, yaitu tanggapan terhadap kata-kata yang didengarkan atau dilihatnya.

B. Penelitian yang relevan

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang terkait. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Andreina Putri.2018. *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Pemberdayaan Pedagang Pasar Panjerejo Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung*. Skripsi Universitas Airlangga. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa persaingan erat antara pasar tradisional dan pasar modern menjadi alasan

pengadaan revitalisasi di pasar tradisional Tulungagung. Pasar Panjerejo telah melalui beberapa tahap revitalisasi, dimana pembangunan pasar ditujukan untuk membangun pasar lebih bersih, rapi dan nyaman sehingga menarik pembeli untuk datang berbelanja. Dengan adanya revitalisasi berdampak adanya pemberdayaan pedagang pasar Panjerejo sehingga pedagang tidak dirugikan dalam melaksanakan transaksi, omset pedagang meningkat sekitar 36% dari sebelumnya.

2. Dormatio.2018. *Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang Bermodal Kecil (Studi Kasus di Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. Skripsi Universitas Lampung. Hasil penelitian ini dilakukan pada 99 pedagang hamparan (responden) yang tersebar di pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan perhitungan sebanyak 24 responden menyatakan meningkat, 67 responden menyatakan sama saja yang merupakan pemilih tertinggi, responden berpendapat bahwa revitalisasi Pasar Mulya Asri sepenuhnya belum tercapai sehingga menyebabkan pendapatan pedagang bermodal kecil sama saja dan 8 responden menyatakan menurun dengan adanya revitalisasi Pasar Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Rohmatun N.2015. *Dampak revitalisasi Pasar Tradisional Asembagus Terhadap Pendapatan Pedagang dan Kepuasan Konsumen di Pasar Asembagus Kabupaten Situbondo*. Skripsi Universitas Jember. Hasil penelitian ini adalah modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

pedagang pasar Asembagus Situbondo dengan arah positif, semakin besar modal maka semakin besar pendapatan pedagang. Jam kerja juga berpengaruh terhadap pendapatan, semakin lama jam kerja maka pendapatan meningkat. Jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pedagang. Hasil distribusi frekuensi kepuasan pembeli bernilai sangat tinggi, jadi masyarakat merasa puas dengan adanya revitalisasi pasar Asembagus.

4. A.A Mirah P. & A.A Ketut A. 2013. *Efektivitas dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Agung Peninjoan*. Jurnal Universitas Udayana. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas revitalisasi pasar akan tercapai dengan adanya dukungan dari semua pihak terutama pengelola pasar dan pedagang selaku pemeran di dalam aktivitas ekonomi di pasar. Tingkat efektivitas revitalisasi di pasar Agung Peninjoan sebesar 71,79% yang artinya memberikan dampak positif dan signifikan bagi kondisi fisik, tata kelola pasar, peningkatan pendapatan pedagang di Pasar Agung Peninjoan.
5. I made G.J & Ida Bagus D.2015. *Analisis Efektivitas Revitalisasin Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Pasar, Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pedagang*. Jurnal Universitas Udayana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas berjalan dengan tingkat keefektifan 89,89 persen, program revitalisasi pasar memberikan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pedagang, peningkatan jumlah pengunjung dan peningkatan pengelolaan pasar Nyanggelan Desa Panjer.

6. Ratu Arum S.2016. *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Bandeng Kota Tangerang*. Skripsi Universitas Sultang Ageng Tirtayasa. Penelitian ini menggunakan teori model Implementasi dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 aspek: aspek ukuran dasar dan tujuan kebijakan belum optimal karena revitalisasi pasar masih sebatas menciptakan lingkungan bersih dan rapi namun dari segi keuntungan pedagang merasa dirugikan karena sepi pengunjung; aspek sumber kebijakan, karena kurangnya SDM dalam mengelola pasar pembinaan bagi pedagang belum maksimal; aspek komunikasi, antar organisasi berjalan baik namun antar pedagang masih kurang karena belum ada solusi mengenai masalah di pasar; aspek karakteristik badan pelaksana menimbulkan permasalahan, disatu sisi revitalisasi dapat meringankan beban perusahaan daerah, namun dalam kinerja pengelolaan potensi daerah belum maksimal karena pengelolaan pasar berada dibawah perusahaan swasta; aspek kondisi ekonomi, sosial, politik belum optimal karena pendapatan pedagang turun kontribusi dari pengelola kepada perusahaan daerah berkurang, tidak ada paguyuban maupun koperasi; aspek kecenderungan, pelaksana menerima adanya revitalisasi namun ada pedagang kecewa karena tidak sesuai dengan yang diharapkan.
7. Annisa Indah M.2010. *Dampak Sosial Ekonomi Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pedagang*. Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak berbeda-beda bagi pedagang, untuk pedagang besar yang memiliki kapital ekonomi dan sosial mapan tidak begitu

merasakan dampak, malah membawa perubahan positif untuk terus memajukan usahanya. Sedangkan bagi pedagang kecil, belum membawa kesejahteraan ke arah lebih baik, pedagang kecil justru merasakan penurunan pendapatan. Revitalisasi membawa pergeseran relasi sosial, bagi pedagang besar cenderung memperoleh jaringan yang lebih luas lagi, namun bagi pedagang kecil harus membangun dari awal karena relasi sosial mereka terkikis.

8. Putri Tungga D.2018. *Efektivitas Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Srago Kabupaten Klaten Terhadap Kesejahteraan Pedagang*. Skripsi Universitas Islam Indonesia. Revitalisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas kebijakan, semakin tinggi pendapatan pedagang semakin tinggi efektivitas kebijakan tercapai, biaya sewa menunjukkan semakin tinggi biaya semakin rendah efektivitas kebijakan, jumlah konsumen tidak berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan, dan komplain pedagang rendah menunjukkan capaian efektivitas kebijakan yang tinggi.
9. Jantanu Budi P.2018.*Revitalisasi Pasar Bung Karno di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri*.Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini menyimpulkan implementasi kebijakan melalui 4 faktor: 1). Komunikasi, dilakukan berupa komunikasi internal dan eksternal, kejelasan informasi cukup jelas dan konsisten, ditunjukkan dengan dilakukan sosialisasi berkali-kali terhadap pedagang;2). Sumber daya, pelaksana kebijakan di pasar ini merupakan orang ahli dalam bidang masing-masing;3). Disposisi, personil

pelaksana berasal dari SKPD terkait dan memiliki dedikasi pada kebijakan;4). Struktur birokrasi, setiap organisasi terpisah dalam kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain. Tapi belum ada SOP antar SKPD.

10. Ranjani, dkk. *Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional (Studi Kasus di BSD Serpong dan Pasar Manis Purwokerto)*. Jurnal Universitas Jenderal Soedirman. Hasil penelitian menyimpulkan proses modernisasi pasar BSD dilakukan baik fisik maupun non fisik, setelah revitalisasi pasar bersih, luas, dan nyaman serta peningkatan kapasitas manajemen pedagang; sedangkan di pasar Manis revitalisasi fokus pada aspek fisik pasar, aspek non fisik sudah diupayakan tapi belum optimal.
11. Siti Nur A. *Analisis Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Tumenggungan Terhadap Pendapatan Pedagang dan Evaluasi Manajemen Tata Kelola Pedagang Pasar Tumenggungan Pasca Program Revitalisasi Menurut Persepsi Pedagang*. Jurnal STIE Pura Bangsa. Hasil Penelitian menyimpulkan persepsi pedagang terhadap program revitalisasi menyatakan setuju dengan adanya revitalisasi, proses berjalan baik ditandai dengan kebersihan fasilitas pasar dan 71% pedagang merasakan kenaikan pendapatan dan 29 % menurun.
12. Ernauli, S.2018. *Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional di Kota Medan*. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan maksimal, sasaran belum maksimal karena kondisi pasar tidak terawat. Sumber daya manusia telah memadai namun fasilitas

belum mendukung, komunikasi antar pelaksana belum berjalan maksimal, karena pedagang tidak menerima sosialisasi dari pemerintah. Badan pelaksana belum maksimal, pelaksana pengelola pasar harus memahami persoalan yang dihadapi pedagang seperti penambahan fasilitas dan perbaikan pasar yang belum maksimal.

13. Fajar, P.2011.*Implementasi Program Revitalisasi Pasar Gading Kota Surakarta*.Skripsi Universitas Sebelas Maret. Kesimpulan penelitian ini yaitu revitalisasi Pasar Gading sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional. Revitalisasi bisa dibilang berhasil terlihat dari 4 indikator; komunikasi yang berjalan baik antar aktor kebijakan; sumber daya mengalami masalah yakni terjadi pembengkakan karena kurang detailnya perencanaan; sikap pelaksana yang ditandai dengan usaha dan niat merevitalisasi dengan maksimal; dan struktur birokrasi yang mendukung penuh adanya revitalisasi.
14. Lista Yarnis.2018.*Dampak Revialisasi Pasar Tradisional Terhadap Ekonomi Pedagang Kios di Pasar Cik Puan Kota Pekanbaru*.Jurnal Universitas Riau. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pihak pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam upaya pembangunan, sebanyak 61,7% responden menyatakan pemerintah tidak pernah rutin meninjau pembangunan, sementara 38,3 responden megatakan pemerintah datang hanya menarik retribusi saja. Tidak ada pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah melakukan blusukan untuk kepentingan partai saja. Pedagang merasa tidak

ada perubahan, justru mengalami penurunan pendapatan, selain itu banyak pedagang yang hampir gulung tikar karena sepi pembeli.

15. Jiyeon, Kim dkk.2014.*Revitalization Of The Gil-Dong Traditional Market in Korea*.Journal of Marketing Thought. Penelitian ini memberikan analisis masalah yang dihadapi pasar Gil-dong. Pasar tradisional menghadapi berbagai ancaman dari kemunculan supermarket, namun rencana revitalisasi hanya berfokus pada perangkat fisik pasar seperti mesin kartu kredit, tempat parkir dan toilet, tanpa rencana revitalisasi pada aspek sosial ekonomi. Studi ini memperkenalkan 3 solusi: menarik konsumen muda, mengembangkan identitas pasar dan strategi pemasaran dan menerapkan sistem yang canggih. Dengan memperkuat kemampuan adaptasi dengan perubahan zaman, pasar yang cocok untuk semua usia, dan dengan dukungan pemerintah, pasar memiliki kesempatan untuk tumbuh.
16. Ju Il Kim dkk.2004.*Dongdaemun, a Traditional Marketplace Wearing a Modern Suit: The Importance Of The Social Fabric in Physical Redevelopments*.Jurnal Habitat Internasional Seoul National University. Studi ini melihat latar belakang dan aspek utama revitalisasi pasar yang sukses. Sistem pola sosial tradisional dari pedagang tidak dihilangkan bahkan berevolusi mengadopsi pola modern. Keberhasilan revitalisasi pasar ini karena tata ruang perubahan tidak merusak pola sosial yang ada. Keberhasilan revitalisasi menunjukkan bahwa kebijakan tidak seharusnya difokuskan pada reformasi fisik, tetapi terhadap konteks sosial yang ada.

17. Sungkyu Lee.2017.*A Study on Traditional Market Decline and Revitalization in Korea -Improving the Iksan Jangung Tradditional Market-*.Journal of Asian Architecture and Building Engineering Pasar Jangung mengalami penurunan daya saing, meskipun sudah dilakukan pembangunan kembali pada tahun 2005. Pusat perbelanjaan masih gagal menarik pelanggan karena lingkungan kurang menarik. Namun, terpilihnya Iksan-si sebagai distrik kota kuno pada tahun 2012 dan pembangunan kereta kecepatan tinggi pada 2014 dipercaya dapat kembali memulihkan reputasi pasar.
18. Lim Myungsuh dkk.2010.*A Study on Revitalization Strategies for DongDaeMoon Fashion Retail Market*.Journal Fashion Bussines Yonsai University. Dalam studi ini revitalisasi dikelola oleh kerjasama swasta dan pemerintah. Dalam hal harga dan desain produk dan manajemen marketing mampu menarik konsumen muda. Masalahnya adalah pada infrastruktur fisik tidak efektif dalam kegiatan perdagangan di pasar DongDaeMoon.
19. Hung Wei, Fu Ren.2018. *Evolving Obligatory Passage Points to Sustain Service Systems: The Case of Traditional Market Revitalization in Hsinchu City, Taiwan*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem layanan menunjukkan proses evolusi dalam mendorong revitalisasi yang dirumuskan dalam empat fase: 1) interaksi aktor; 2) penciptaan nilai bersama; 3) pemodelan hubungan; dan 4) transformasi aktor (pemangku kepentingan).
20. Yamamoto S.2013.*Revitalization of Traditional Craft Industry through the Entry of Youth Power in Kyoto City, Japan*.Buletin Universitas Tohoku.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaum muda diperlukan dalam mendukung keberhasilan revitalisasi, mereka harus berpartisipasi dalam menciptakan produk serta terlibat dalam kegiatan promosi produk terutama inovasi produk yang dilakukan oleh kaum pemuda.

C. Kerangka Berpikir

Widayat dan Amirullah (dalam Dormatio, 2018:27) memberikan pengertian kerangka berfikir sebagai sebuah konsep tentang bagaimana hubungan teori terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Kerangka berfikir juga memberikan penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi masalah penelitian.

Dalam program revitalisasi pasar melibatkan masyarakat, aparatur pemerintah baik tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta berbagai lembaga diluar pemerintah sudah banyak dilakukan di Kota Semarang. Kondisi pasar tradisional yang dianggap sudah tidak layak pakai, becek dan bau serta fasilitas yang tidak memadai seperti toilet tidak layak, tidak ada tempat sampah, tempat parkir yang tidak memadai dan juga fungsi pasar yang tidak optimal menjadi alasan pemerintah melakukan revitalisasi pasar tradisional, yang berpedoman pada kebijakan Kementerian Perdagangan tentang revitalisasi 5000 pasar tradisional termasuk salah satunya pasar tradisional di Kota Semarang adalah pasar Bulu.

Penelitian ini melihat dampak dari kebijakan revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan

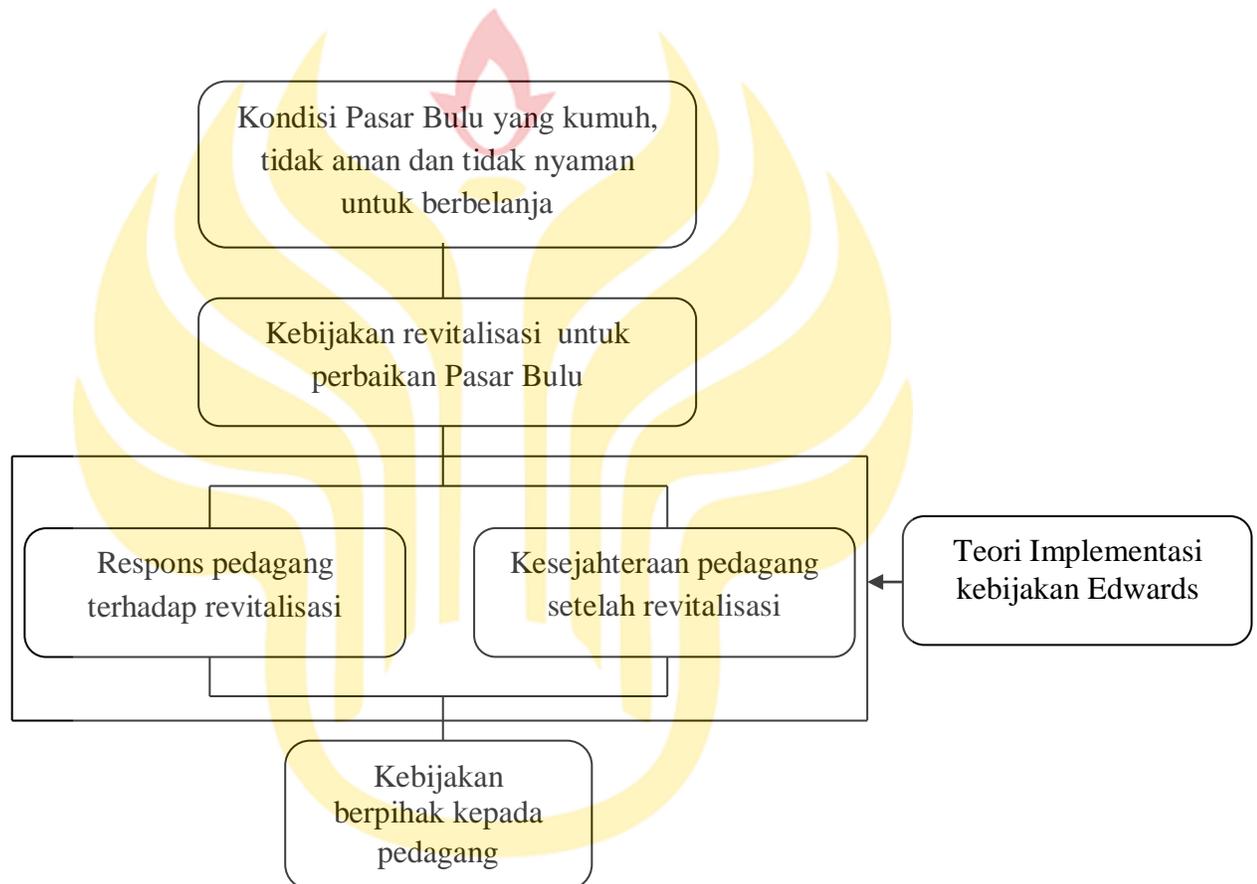
dari Edwards III. Menurut Edward (dalam Winarno:2008:174), Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan meskipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik (dalam Handoyo 2013:112). Dalam mengkaji implementasi kebijakan digunakan 4 faktor, antara lain:

1. Komunikasi;
2. Sumber-sumber;
3. Komitmen; dan
4. Struktur birokrasi

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Hal yang penting adalah kecakapan pelaksana yang akan mengimplementasikan kebijakan. Komitmen berkaitan dengan kesediaan dan komitmen implementator dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi

birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik (Handoyo, 2013:112).

Berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini:



Bagan 1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Bulu Kota Semarang, maka sesuai dengan tujuan penelitian diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas pedagang informan Pasar Bulu memberikan respons negatif terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang tentang revitalisasi Pasar Bulu. Respons negatif para pedagang disebabkan karena pedagang belum puas dengan kinerja pemerintah terutama terkait pendapatan pedagang setelah revitalisasi Pasar Bulu. Revitalisasi Pasar Bulu memang memberi dampak baik terutama pada aspek fisik bangunan pasar yang menjadi lebih baik, namun diperlukan peninjauan kembali terhadap sarana dan prasarana terutama pada lantai dua dan lantai tiga pasar
2. Revitalisasi Pasar Bulu tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Revitalisasi menyebabkan pedagang mengalami penurunan pendapatan yang berakibat pada tidak diperolehnya kesejahteraan pedagang.

B. Saran

- a. Pemerintah Kota Semarang sebaiknya meninjau kembali kondisi fisik bangunan pasar terutama pada lantai dua dan lantai tiga Pasar Bulu sesuai dengan keluhan para pedagang. Akses ke lantai dua dan lantai tiga diperlukan tambahan jalan dan petunjuk arah agar lebih memudahkan pedagang dan juga pengunjung dalam menjangkau lantai dua dan lantai tiga pasar. Selain itu diharapkan pemerintah memberikan upaya-upaya pemberdayaan pedagang yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Dalam rangka peningkatan pendapatan para pedagang, diperlukan adanya upaya peran pemerintah yang lebih nyata berupa bantuan sarana berdagang, pinjaman modal maupun pembinaan kepada pedagang dari Pemerintah Kota Semarang agar pedagang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sujanto, Agus.2004.*Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danisworo M & Martokusumo M.2002.*Revitalisasi Kawasan Kota: Sebuah Catatan Dalam Pengembangan Dan Pemanfaatan Kawasan Kota*.Info URDI Vol. 13
- Gunawan, Iman.2013.*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoyo, Eko.2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai Instrumen Data Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Hosio, J.E.2006.*Kebijakan Publik & Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.
- Malano, Herman.2011.*Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant . 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Prastowo, Andi. 2016.*Metode Penelitian Kualitaitaif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahmat, Jalaludin.1999.*Psikologi Komunikasi*.Bandung: Remaja Rosdyakarya
- Sadilah, Emiliana dkk. 2011. *Eksistensi Pasar Tradisional : Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang-Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Sarwono, Jonathan.2006.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subandi, Ahmad.1982.*Psikologi Sosial, Jakarta: Bulan Bintang*.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Urban Sector Development Report Project (USDRP).2012.*Pedoman Umum Manajemen Pasar*.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Walgito, Bimo.1999.*Psikologi Umum*.Yogyakarta:UGM
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang :
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umun Nomor: 18/Prt/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/MDAG/PER/12/2013
Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Tradisional

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional

Skripsi :

Anggraeni, Andreina Putri.2018.*Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam
Pemberdayaan Pedagang Pasar Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten
Tulungagung*. Skripsi: Unversitas Airlangga.

Irnowati, Hussein.2014.*Peranan Pememrintah Daerah Kota Yogyakarta Dalam
Pengelolaan Pasar Tradisional Dalam Rangka Mempertahankan Eksistensi
Pasar Tradisional di Kota Yogyakarta*.Skripsi: Universitas Gajah Mada

Dormatio.2018. *Dampak Kebijakan Revitalisasi Pasar Terhadap Pendapatan
Pedagang Bermodal Kecil (Studi Kasus di Pasar Mulia Asri Kabupaten
Tulang Bawang Barat)*. Skripsi: Universitas Lampung.

Nikmah, Rohmatun. 2015. *Dampak revitalisasi Pasar Tradisional Asembagus
Terhadap Pendapatan Pedagang dan Kepuasan Konsumen di Pasar
Asembagus Kabupaten Situbondo*. Skripsi: Universitas Jember

Jurnal :

Endrawati, Susilo dkk. *._Dampak Relokasi Pasar Studi Kasus di Pasar Sampangan
Kota Semarang*. Jurnal: Untag Semarang

Fitri, dkk.2018.*Analisis Kebijakan Pengembangan Pasar Bulu Kota Semarang
Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasaar
Tradisional*.Jurnal Universitas Diponegoro

Fransisca Yaningwati, dkk.2009.*Dampak Keberadaan Hypermarket Terhadap
Pedagang Pasar Tradisional*. Laporan Hasil Penelitian Fundamental,
Universitas Brawijaya, Malang.

Website :

<https://ews.kemendag.go.id/revitalisasi/progrespembangunan.aspx>

Farissa. 2017. Hingar Bingar Hari Pasar Rakyat Nasional, Konsep Pasar Tradisional
ke Depan, Melawan Serbuan Pasar Modern.
<https://www.kompasiana.com/ikhwanulparis/588b6bb9b192731414fadefb/hingar-bingar-hari-pasar-rakyat-nasional-konsep-pasar-tradisional-ke-depan-melawan-serbuan-pasar-modern?page=all>